

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, eksistensi madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan formal pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Madrasah lahir sejak awal abad ke-20<sup>1</sup>. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan modern dalam Islam di Indonesia dan adanya respons tokoh-tokoh pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya gerakan modern di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang sangat kompleks. Salah satu pemicu kesadaran ini, menurut Karel A. Steenbrink, adalah dorongan untuk melakukan pembaruan pendidikan.<sup>2</sup>

Kesadaran tentang pentingnya pembaruan pendidikan Islam dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu, seperti: Jamiat al-Khairat (1905) di Jakarta, Sarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Sumatra Thawalib (1918) di Sumatera, Persis (1923) di Bandung, dan Nahdlatul Ulama (1926) di Surabaya.<sup>3</sup> Meskipun tidak seragam dalam memperkenalkan pembaruan, organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan inovasi dalam pendidikan seperti sistem pendidikan yang baru, memakai didaktik-metodik dalam pembelajaran, dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang maju di lingkungan masing-masing.

Di Kalimantan Barat, cikal bakal keberadaan madrasah ditandai dengan dirintisnya Madrasah Sulthaniyah (1915) di Sambas<sup>4</sup> yang dimotori langsung oleh Kerajaan Sambas. Setelah berdirinya madrasah ini, disusul dengan lahirnya Madrasah

---

<sup>1</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangan* (Jakarta: Logos, 1999), 40.

<sup>2</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1994), 26-29.

<sup>3</sup> Lihat misalnya, A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1972), 9.

<sup>4</sup> Kerajaan Sambas, "Baitul Mal", Manuskrip, (Sambas: Museum Tamadun Islam).

Darul Falah wa al-Najah (1918) di Mempawah<sup>5</sup>, Madrasah Islamiyah Kampung Bangka (1926)<sup>6</sup>, Madrasah Islamiyah Kampung Mariana (1926)<sup>7</sup>, Madrasah Saigoniyah (1928)<sup>8</sup>, Madrasah BAWARI (1936)<sup>9</sup>, dan Madrasah Abdurrahmaniyah (1938)<sup>10</sup>. Kelima madrasah yang disebut terakhir berlokasi di Pontianak. Dimulai dari berdirinya tujuh madrasah inilah, mendorong tumbuh dan berkembangnya madrasah-madrasah baru di Kalimantan Barat yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 500 buah<sup>11</sup>.

Sebelum kehadiran madrasah-madrasah ini, pendidikan Islam di Kalimantan Barat berlangsung di surau atau masjid, rumah-rumah guru, dan istana. Tempat-tempat ini lebih merupakan lembaga untuk mempelajari agama dalam arti yang sempit seperti belajar membaca Alquran, rukun iman sekadarnya, berbagai tata cara ibadah seperti salat, puasa, dan zakat. Bagi mereka yang berlama-lama di lembaga ini juga berkesempatan untuk turut dalam kegiatan tarekat. Di lembaga pendidikan jenis ini, buku bacaan belum tersedia, semua kurikulumnya tergantung pada guru. Sementara sistemnya menggunakan pola *h}alaqah*, di mana murid dan guru bersama-sama duduk di lantai membentuk lingkaran. Murid-muridnya berasal dari kalangan remaja, pemuda sampai dewasa. Waktu belajar umumnya sore dan malam hari. Lama belajar tidak dibatasi; dari satu-dua tahun bahkan hingga belasan tahun. Maka, kehadiran madrasah pertama di Sambas sebagaimana diuraikan di muka, diasumsikan sebagai upaya inovatif terhadap lembaga pendidikan surau maupun rumah guru dan

---

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008), 382.

<sup>6</sup> Erwin, *Menyonsong Seabad Perguruan Islamiyah Kampung Bangka Pontianak* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015), 23.

<sup>7</sup> Abdul Rani Mahmud, "Peranan Ulama dan Fungsi Surau di Kalimantan Barat", *Arsip* (Pontianak: Koleksi Pribadi), 9. t.d.

<sup>8</sup> Mahmud, "Peranan Ulama", 9.

<sup>9</sup> Zulkifli, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Yayasan Badan Wakaf Raudhatul Islamiyah (BAWARI)", *Laporan Penelitian Dosen* (Pontianak: Perpustakaan IAIN Pontianak, 2009), 12. t.d.

<sup>10</sup> Madrasah ini didirikan oleh Sultan Syarif Muhammad Alkadri (berkuasa tahun 1896-1944). Lihat, Mahmud, "Peranan Ulama", 9.

<sup>11</sup> Lihat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, "Education Management Information System [EMIS]" (Pontianak: Kanwil Kemenag Kalbar, 2009).

istana yang sebelumnya pernah eksis di Kalimantan Barat. Madrasah ini mulai memperkenalkan cara-cara belajar dan mengajar dengan pola baru. Menetapkan sistem berkelas yang lebih sempurna, memakai bangku dan meja murid, kurikulum diatur dengan baik dan disempurnakan, organisasi dan administrasi madrasah mulai disusun<sup>12</sup>, uang sekolah mulai dipungut dari anak-anak dan tamatannya diberi ijazah. Puncaknya pada 1936, terjadi restrukturisasi Madrasah Sulthaniyah menjadi Sekolah Tarbiyatul Islam.<sup>13</sup> Perubahan nomenklatur madrasah menjadi sekolah berdampak pada penyelenggaraan sistem pendidikannya di kemudian hari.

Lebih lanjut, Madrasah Sulthaniyah memiliki kekhasan sebagai berikut: *Pertama*, madrasah ini merupakan lembaga pendidikan Islam formal tertua di Kalimantan Barat. Tidak banyak madrasah yang mampu *survive*; berdiri sejak zaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang, orde lama, orde baru, dan tetap bertahan hingga era reformasi.<sup>14</sup> Memasuki 2018, madrasah ini telah genap berusia seabad (1918-2018). *Kedua*, sejak awal berdirinya, madrasah ini telah mendapat sambutan luas dari masyarakat. Lembaga pendidikan ini tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat Muslim di Kalimantan Barat. Sebagaimana dilaporkan dalam manuskrip Sepatah Kata tentang Perkataan al-Madrasah al-Sulthaniyah (SKMS), bahwa Asisten Residen langsung meninjau madrasah ini segera setelah berdirinya, menyusul dikeluarkannya *Wilde Schoolen Ordonantie* (Ordonansi Sekolah Liar)<sup>15</sup>. Perwakilan pemerintah kolonial ini memeriksa sistem dan kurikulum yang digunakan. *Ketiga*, madrasah ini menolak subsidi pemerintah kolonial. Kebijakan ini

---

<sup>12</sup> Sejumlah jabatan yang terbentuk di madrasah ini seperti: Presiden madrasah, kepala dan *nazhir* madrasah, dan komite madrasah. Jabatan dan pemangkunya sebagaimana termaktub dalam *syahadah* (ijazah/tanda tamat belajar) Madrasah Sultaniyah yang diterbitkan tahun 1926.

<sup>13</sup> Perkoempoelan Tarbiatoel Islam, *Statuten en Huishoudelijk Reglement Perkoempoelan Tarbiatoel Islam*, Arsip, (Sambas: Perkoempoelan Tarbiatoel Islam, 1936).

<sup>14</sup> Sebut saja misalnya Madrasah Taufiqiyah (1930) di Mempawah dan Madrasah Abdurrahmaniyah (1928) di Pontianak. Kedua madrasah ini difasilitasi oleh Kerajaan sebagaimana Madrasah al-Sultaniyah, namun tidak berumur panjang, antara lain lantaran kurangnya biaya dan lemahnya manajerial organisasi dan administrasi madrasah.

<sup>15</sup> Ordonansi Sekolah Liar memang disosialisasikan oleh Pemerintah Kolonial, meskipun di Kalimantan Barat tidak terdapat organisasi yang berhaluan keras seperti di Pulau Jawa atau Sumatera, namun tetap saja menyisakan kekhawatiran berupa ancaman politik misalnya pemberontakan bagi pihak pemerintah jika tidak dilakukan pengawas ketat.

diambil agar perkembangan pendidikan di madrasah ini tidak terkontaminasi oleh kebijakan dan kepentingan politik penjajah dalam bidang pendidikan. Meskipun tumbuh dan berkembang tanpa subsidi pemerintah Gubernumen, madrasah ini tetap menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam perubahan masyarakat Muslim lantaran besarnya dukungan masyarakat.<sup>16</sup> *Keempat*, berpredikat Sekolah Arab. Disebut demikian lantaran seluruh materi ajarnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab, khususnya terbitan Mesir. Guru-gurunya menggunakan jubah dan serban<sup>17</sup> layaknya ulama-ulama di Arab. Bahasa pengantarnya tidak menggunakan bahasa daerah melainkan bahasa Arab.<sup>18</sup> Adapun murid laki-laki menggunakan celana dan kemeja panjang berwarna putih dan kopiah berwarna hitam. Sementara murid perempuan menggunakan baju kebaya. Gelar ini juga dimaksudkan untuk membedakannya dengan lembaga pendidikan umum yang sebelumnya sudah pernah ada seperti Sekolah Melayu (*Volkschool*), Sekolah Cina (*Holland Chinese School*), dan Sekolah Belanda (*Holland Inlandsche School*). *Kelima*, madrasah ini merupakan pusat kaderisasi ulama di Kerajaan Sambas. Kebijakan kerajaan dengan membentuk jabatan keagamaan Islam mulai dari Maharaja Imam, Imam, Khatib, Penghulu, Lebai, Modim dan Bilal<sup>19</sup> termasuk guru-guru agama dan muballigh<sup>20</sup> meniscayakan tersedianya sumber daya manusia yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut. Alumni Madrasah Sulthaniyah telah berhasil mengambil peran ini. Madrasah Sulthaniyah memerankan dirinya menjadi kawah candradimuka dalam membenahi institusi-institusi keagamaan Islam lainnya di Kerajaan Sambas.

---

<sup>16</sup> Kajian tentang partisipasi masyarakat ini lihat lebih lanjut, Erwin Mahrus, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Madrasah Sultaniyah Sambas, Kalimantan Barat", Laporan Penelitian Dosen (Pontianak: Perpustakaan IAIN Pontianak, 2014).

<sup>17</sup> Serban adalah kain ikat kepala yang lebar (dipakai oleh orang Arab, haji, dan sebagainya). Lihat Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 825.

<sup>18</sup> Martin van Bruinessen, Muhammad Basyuni b. Muhammad Imran, Sambas West Borneo, 1885-1953 dalam *Dictionnaire Biographique des Savants et Grandes Figures du Monde Musulman Peripherique*, 1992.

<sup>19</sup> Kerajaan Sambas, "Undang-undang Pegawai Agama di Kerajaan Sambas", manuskrip, (Sambas: Museum Tamadun Islam, t.t.). t.d.

<sup>20</sup> Perkoempoelan Tarbiatoel Islam, *Statuten*, 1937.

Eksistensi Madrasah Sulthaniyah ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh bernama H. Muhammad Basiuni Imran (selanjutnya disebut Basiuni). Ia adalah tokoh Islam yang memiliki perhatian pada inti perdebatan intelektual Islam pada awal abad XX, saat dia menanyakan kondisi umat Islam di Hindia Belanda dan Muslim di dunia global.<sup>21</sup> Sehingga pertanyaannya ini menginspirasi sarjana Syria, Amir Syakib Arslan (1869-1946) untuk menulis sebuah buku berjudul *Mengapa Muslim Terbelakang Sementara yang Lain Mengalami Kemajuan?*.<sup>22</sup> Buku ini kemudian dicetak pada 1940 dan dipublikasikan oleh al-Manar Press Kairo, ke seluruh dunia. Buku ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia pada 1954 oleh penerbit Bulan Bintang. Paling mutakhir, Islamic Book Trust merilis versi Inggrisnya, *Our Decline and Remedies*, 2004.<sup>23</sup>

Sementara itu, dalam daftar yang dibuat oleh Abu Shawk tentang kontibutor artikel, berita dan pertanyaan (*istifta'*) untuk wilayah Asia Tenggara yang ditujukan kepada Jurnal al-Manar dalam rentang waktu 1898-1935,<sup>24</sup> mencatat Basiuni sebagai salah satu penyumbang tulisan. Tulisannya yang terekam dalam jurnal kaum pembaru ini hingga mencapai 20 item. Di samping itu, pemikiran Basiuni dalam bentuk buku dicetak dan dipublikasi oleh penerbit di Mesir, Singapura, Malaysia dan Tanah Air sendiri. Karya tulisnya tersebut mencapai sebelas buah dengan berbagai disiplin ilmu keislaman mulai dari tauhid, fikih, tafsir (*'ulum al-Quran*), dan sejarah. Semua kitabnya berdimensi pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana ditegaskannya dalam setiap pengantar kitabnya tersebut. Sebagiannya lagi dijadikan sebagai buku ajar di Madrasah Sulthaniyah dan Sekolah Tarbiyatul Islam.

---

<sup>21</sup> Muhammad Basiuni Imran, "Lima>dha> Ta'akhkhar al-Muslimu>n wa Lima>dha> Taqaddama Ghayruhum?", *Jurnal al-Manar*, volume 31, nomor 5, (30 Sya'ban 1349 H/19 Januari 1931 M), 353-354.

<sup>22</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2012), 267.

<sup>23</sup> Tim Pustaka al-Kautsar, "Pengantar Penerbit", dalam Shaykh Shaki>b Arsla>n, *Kenapa Umat Islam Tertinggal*, terjemahan oleh Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), vi-vii

<sup>24</sup> Ahmad Ibrahim Abu Shawk, *al-Atha>r al-Ka>milah li Majallat al-Mana>r 'an Janu>b Sharq Asia> (1898-1935)*, (Kuala Lumpur: al-Ja>mi'ah al-Isla>miyyah al-'A<lamiyyah bi Maliziyya, 2006).

Tabel 1  
Karya H. Muhammad Basiuni Imran

No.	Judul Kitab	Penerbit	Tahun
1.	<i>Al-Nus}us} wa al-Bara&gt;hi&gt;n</i>	Mesir	1935
2.	<i>Cahaya Suluh</i>	Singapura	1920
3.	<i>Tadhki&gt;r</i>	Singapura	1931
4.	<i>Khula&gt;s}ah Si&gt;rah</i>	Singapura	1932
5.	<i>Bida&gt;yat al-Tawhi&gt;d</i>	Singapura	1934
6.	<i>Irsha&gt;d al-Ghilma&gt;n</i>	Singapura	1934
7.	<i>Duru&gt;s al-Tawhi&gt;d</i>	Singapura	1935
8.	<i>Nu&gt;r al-Sira&gt;j</i>	Singapura	1938
9.	<i>H}usn al-Jawa&gt;b</i>	Malaysia	1935
10.	<i>Kita&gt;b al-Jana&gt;'iz</i>	Tasikmalaya, Indonesia	1943

Sumber: Data diolah dari karya-karya cetak Basiuni (rentang 1920-1943)

Sepanjang penelusuran yang dapat dilakukan, melalui buku penjualan kitab yang ditulis oleh Basiuni sendiri, bahwa karyanya ini tersebar hingga di Pulau Jawa dan Sumatera. Seperti dilaporkan, bahwa A. Hassan, Sang Pendiri Persis (Persatuan Islam) ini memesan beberapa eksemplar karya Basiuni berjudul *Khulas}ah Si>rah*.<sup>25</sup> Demikian pula, H. Yusuf dari Midai, Kepulauan Riau yang mengorder *Kitab al-Jana>'iz*.<sup>26</sup> Namun jika dilihat dari pusat penerbitannya, dapat diduga peredaran karya Basiuni ini meliputi Asia Tenggara bahkan menjangkau dunia Islam. Tidak berlebihan jika kemudian, Mutawalli merilis posisi Basiuni masuk dalam deretan ulama besar Timur Tengah permulaan abad XX.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> H. Muhammad Basiuni Imran, "Buku Penjualan Kitab Maharaja Imam Sambas", manuskrip (Sambas: Museum Tamadun Islam).

<sup>26</sup> Basiuni, "Buku Penjualan Kitab".

<sup>27</sup> Tamir Muhammad Mahmud Mutawalli, *Manha>j Shaykh Muhammad Rashid Rid}a fi al-'Aqi>dah*, (Jeddah: Dar Majid al-'Asiri, 2014), 90-92

Tabel 2  
Ulama-ulama Kalangan Almuni Da'ir Da'wah wa al-Irshad Mesir

No.	Nama	Jabatan
1.	Syekh Yusuf Yasin	Penasehat King Abd al-Aziz ibn Sa'ud
2.	Syekh Amin al-Husayni	Mufti Palestina
3.	Syekh Abd al-Razaq al-Hindi	Murshid
4.	Syekh Muhammad Basiuni Imran	Maharaja Imam Sambas
5.	Syekh Muhammad Bahjat al-Baitar	Murshid
6.	Syekh Muhammad Hamid al-Faqih	Pendiri Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyah
7.	Syekh Muhammad Razaq Hamzah	Imam Masjid Haram
8.	Syekh Abd al-Zahir al-Samh	Imam Masjid Haram
9.	Syekh Abd al-Sami' al-Batli	Murshid
10.	Syekh Muhammad Abu Zayd	Murshid
11.	Abd Allah Khidyar al-Hindi	Murshid

Sumber: Diolah dari Mutawalli (2014: 90-92)

Kiprah Basiuni, selain merintis lembaga pendidikan Islam modern dan menyusun kurikulum sebagaimana disebut di awal, ia juga menjadi tokoh utama di balik penyusunan “Peraturan dan Undang-undang Pegawai Agama di Kerajaan Sambas”, “Undang-undang Raad Agama Sambas Borneo Sebelah Barat”, dan “Undang-undang Baitul Mal Kerajaan Sambas”. Melalui peraturan dan perundang-undangan yang Basiuni susun, sejumlah kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Sambas ia tetapkan.<sup>28</sup> Tidak berlebihan jika kemudian Ridja di Mesir menjadikan

<sup>28</sup> Misalnya dalam Undang-undang Baitul Pasal 8 Ayat 3 disebutkan bahwa segala biaya untuk sekolah-sekolah agama Islam, masjid, dan sebagainya dari pada maslahat orang Islam diambilkan dari Baitul Mal. Lihat lebih lanjut, Kerajaan Sambas, “Aturan (Undang-undang) Baitul Mal di Kerajaan Sambas”, Manuskrip, (Sambas: Museum Tamadun Islam). t.d.

Basiuni sebagai rujukan utama dalam strategi *islah* (perbaikan) *tarbiyah isla>miyah* di Tanah Jawi.<sup>29</sup>

Kontribusi Basiuni di Dunia Islam di atas menjadi paradoks jika dihadapkan dengan sejumlah literatur sejarah Islam Nusantara. Sejauh penelusuran peneliti terhadap 31 buah buku teks dan literatur Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI),<sup>30</sup> hanya dua di antaranya

---

<sup>29</sup> Muhammad Basiuni Imran, “al-Mura>salat al-‘Ilmiyyah”, Manuskrip, (Sambas: Museum Tamadun Islam), t.d.

<sup>30</sup> Buku teks dan literatur tersebut adalah: (1) Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, [Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001]; (2) Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, [Malang: UMM Press, 2006]; (3) Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, [Ciputat: Quantum Teaching, 2005]; (4) Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam*, [Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007]; (5) Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* [Jakarta: Kencana, 2013]; (6) Suwito dan Fauzan (eds.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, [Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005]; (7) Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, [Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008]; (8) Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, [Jakarta: Bumi Aksara, 1985]; (9) Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* [Jakarta: Grasindo, 2001]; (10) Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, [Jakarta: Logos., 1999]; (11) Enung K. Rukiati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, [Bandung: Pustaka Setia, 2006]; (12) Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah* [Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001]. (13) Karel A.Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, [Jakarta: LP3ES, 1994]; (14) Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indoensia Abad ke-20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, [Jakarta: Kencana, 2012]; (15) Maksum, *Madrasah Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, [Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999]; (16) Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, [Jakarta: LP3ES, 1988]; (17) Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, [Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007]; (18) H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlansche Zaken*. [Jakarta: LP3ES, 1986]; (19) Muhammad Iskandar (ed.), *Peran Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. [Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000]; (20) Mona Abaza, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi Studi Kasus Alumni Al-Azhar*, [Jakarta: LP3ES, 1999]; (21) Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, [Bandung: Mizan, 2002]; (22) Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, [Bandung: Rosda Karya, 1999]; (23) Azyumardi Azra, *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*, [Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999]; (24) Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, [Jakarta: Logos, 2000]; (25) Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty, *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam di Indonesia* [Jakarta: Raja Grafindo Persada dan PPIM Jakarta, 2006]; (26) Muh. Saerozi, *Pembaruan Pendidikan Islam Studi Historis Indonesia dan Malaysia 1900-1042*, [Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013]; (27) Muljanto Sumardi, *Pendidikan Islam Bunga Rampai Pemikiran tentang Madrasah dan Pesantren*, [Pustaka Biru, 1980]; (28) Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, [Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004]; (29) Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya dan Yayasan Ilmu Sosial, 1985); (30) Pijper, G.F., *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. diterjemahkan oleh Tudjimah, [Jakarta: UI Press, 1984]; (31) B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, [Jakarta: Grafiti Press, 1985].



yang menyebut nama Basiuni sebagai tokoh pendidikan. Selebihnya hanya menyebut nama KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, A. Hassan, Ahmad Surkati, Abdullah Ahmad, Zainuddin Labay, Rahmah al-Yunusiyah. Bahkan kajian tentang tokoh-tokoh pesantren di pulau Jawa telah diteliti dan dipublikasikan secara khusus, misalnya karya Abdurrahman Mas'ud yang berjudul *Intelektual Pesantren* yang sebelumnya adalah disertasi yang ia pertahankan di University of California Los Angeles (UCLA),<sup>31</sup> atau studi sekaligus publikasi Ahmad Baso yang berjudul *Pesantren Studies*. Hal ini berbanding terbalik dengan dengan penelitian dan publikasi tokoh pendidikan yang berasal dari luar Pulau Jawa, yang justru terkesan terabaikan. Oleh karena itu, signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan informasi tentang tokoh pendidikan yang memiliki jaringan internasional, yang berasal dari Pulau Borneo (Kalimantan).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian (*research problem*) ini adalah bagaimana kontribusi Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Basiuni Imran dalam pendidikan Islam di Kerajaan Sambas (1915-1950)? Masalah penelitian ini diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Basiuni Imran?
2. Bagaimana pemikiran Maharaja Imam Sambas dalam pendidikan Islam?
3. Bagaimana praktik Maharaja Imam Sambas dalam pendidikan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Basiuni Imran dalam pendidikan Islam di

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, terjemahan dari *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

Kerajaan Sambas (1915-1950). Sementara itu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi profil Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Basiuni Imran;
2. Menemukan pemikiran Maharaja Imam Sambas dalam inovasi pendidikan Islam;
3. Menemukan praktik Maharaja Imam Sambas dalam inovasi pendidikan Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat, setidaknya dalam dua kebutuhan:

1. Secara teoretis, penelitian ini sangat penting untuk menggali pemikiran dan praktik pendidikan dalam upaya pengembangan pendidikan Islam kini dan akan datang. Dalam konteks historis, banyak pemikiran dan praktik yang telah dikembangkan oleh organisasi atau perseorangan dalam mengembangkan pendidikan Islam tetapi belum dikaji secara memadai.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
  - a. Pesantren, madrasah dan sekolah khususnya di Kalimantan Barat untuk memanfaatkan salah satu produk pemikiran Maharaja Imam Sambas yaitu tentang pentingnya pembelajaran Arab Melayu sebagai sebuah warisan (*heritage*) ulama-ulama Melayu masa silam.
  - b. Lembaga pendidikan tinggi dan para akademisi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam menelusuri sejarah tokoh, sejarah Islam Nusantara, dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang masih dirasakan sangat minim. Dengan demikian, disertasi ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan informasi tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
  - c. Peneliti lain, disertasi ini dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih lanjut tentang tokoh pendidikan asal Kalimantan ini guna memperkaya, memperkuat dan membandingkan temuan-temuannya.

#### **E. Definisi Operasional**

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini secara teknis memiliki arti yang khas. Untuk menghindari salah interpretasi, istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan secara eksplisit. Istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan oleh Maharaja Imam Sambas dalam melakukan inovasi pendidikan di Kerajaan Sambas (1915-1950). Sumbangsih ini dapat berbentuk teoretik, dan dapat pula berupa praktik. Sumbangsih teoretik meliputi pemikiran atau gagasan maharaja imam dalam bidang pendidikan. Sementara sumbangsih praktik adalah kinerja (performa) atau gerakan maharaja imam tersebut dalam melakukan pembaruan penyelenggaraan pendidikan Islam di Kerajaan Sambas.
2. Maharaja Imam Sambas merupakan gelar tertinggi pegawai agama di Kerajaan Sambas. Jabatan sekaligus gelar ini terbentuk sejak tahun 1867 di masa pemerintahan Sultan S}afiyuddin II (1866-1922). Dalam disertasi ini maharaja imam merujuk kepada jabatan yang diduduki oleh H. Muhammad Basiuni Imran sebagai Kadi dan Mufti III Kerajaan.
3. Kerajaan Sambas adalah sebuah kuasa yang berdiri di sebelah utara dari Kalimantan Barat. Kerajaan Sambas yang dimaksud di sini adalah Sambas sebagai sebuah kesultanan Islam yang didirikan oleh Sultan Muhammad S}afiyuddin I pada 1631, dan bukan kerajaan Sambas Hindu yang beribukota di Negeri Kota Lama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kondisi awal pendidikan Islam di Kerajaan Sambas sejak berdirinya di abad ke-17 hingga penghujung abad ke-19 dapat dikatakan masih terbelakang. Indikator keterbelakangan tersebut misalnya dapat dilihat dari: *Pertama*, lembaga pendidikan

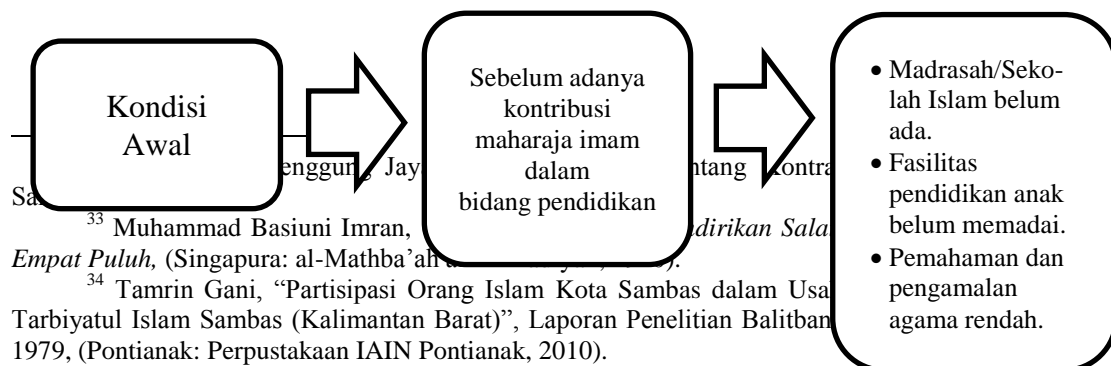
formal keagamaan belum ada<sup>32</sup>. *Kedua*, rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, antara lain ditunjukkan oleh masyarakatnya yang masih banyak meninggalkan salat wajib dan fardu Jumat.<sup>33</sup> *Ketiga*, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang semestinya. Pendidikan keagamaan baru terbatas untuk laki-laki dewasa dan kalangan ibu-ibu.<sup>34</sup>

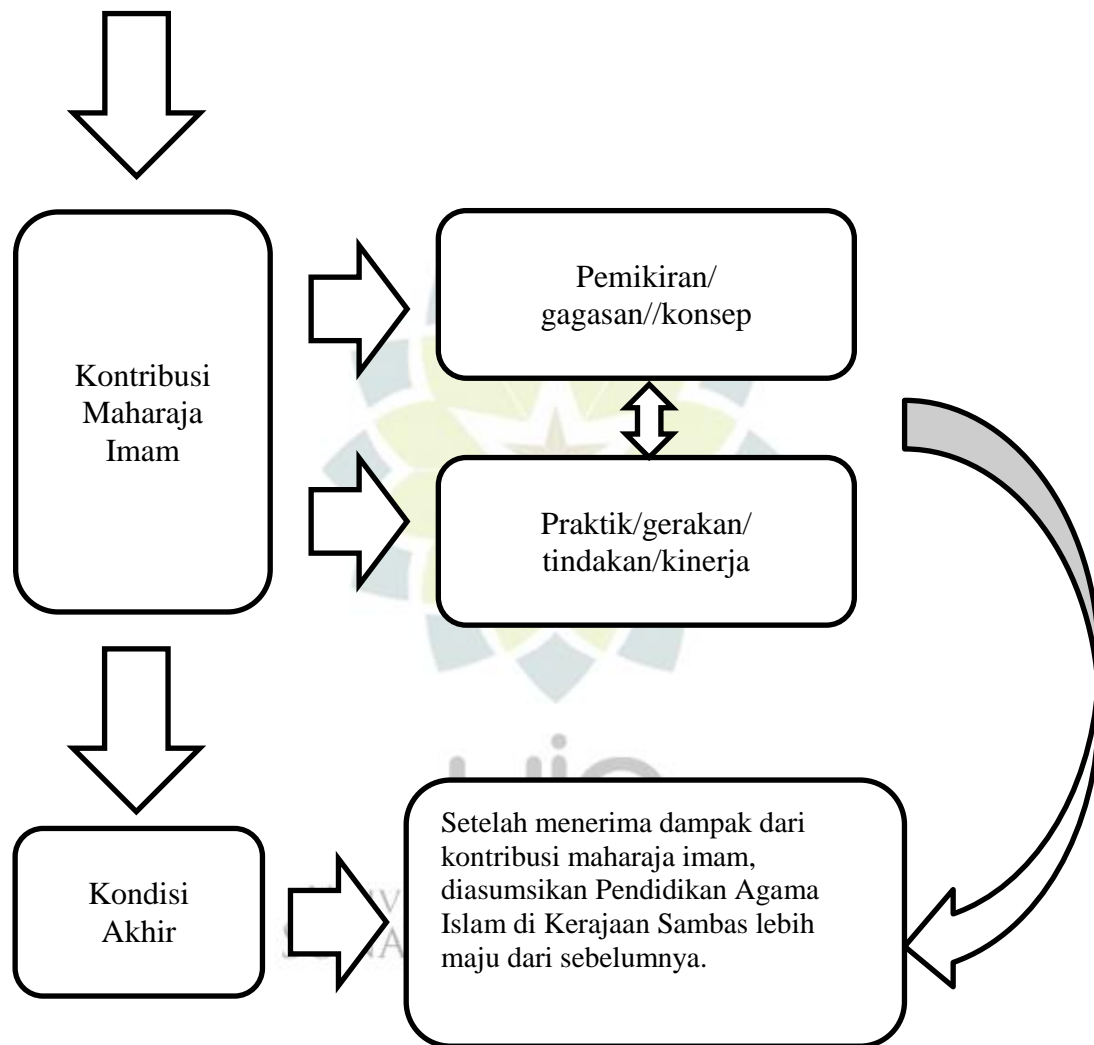
Sementara itu, kedudukan Basiuni sebagai maharaja imam menuntutnya menangani banyak hal termasuk bidang pendidikan. Kontribusi merupakan aspek dinamis dalam sebuah kedudukan ketika merespons sebuah fenomena. Sikap seperti ini coba ditampilkan oleh Basiuni dalam kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi keagamaan Islam di kerajaan Sambas tersebut. Dengan kapasitas keilmuan berupa gagasan-gagasan dan gerakan baru, ia memanfaatkan saluran-saluran komunikasi baru, dan memperluas jaringan pendidikan yang belum pernah ada sebelumnya, dalam waktu yang relatif singkat, pasca resmi diangkat sebagai kadi dan mufti kerajaan. Menurut Rogers dalam sebuah upaya perbaikan (pembaruan) terdapat empat komponen penting: *ideas, communication channels, social network, dan time*.

Kerangka pemikiran penelitian tentang kontribusi maharaja imam tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1:

### Kerangka Pemikiran





### G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran terhadap penelitian sejenis yang dilakukan, maka setidaknya terdapat sejumlah tulisan, hasil penelitian atau artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan karya ilmiah, masing-masing sebagai berikut:

1. Artikel *Lima>dha> Ta'akhhkar al-Muslimu>n wa Limadha> Taqaddama Ghayrum*, oleh Syekh Muhammad Rashid Rid}a dalam Jurnal al-Manar, volume 31, nomor 5, Jumad al-Akhir 1349 (1930), 353-354. Dalam tulisan ini, Rid}a mengulas tentang sosok Basiuni Imran sebagai muridnya, dan ketika artikel ini disusunnya, Basiuni menjabat sebagai Maharaja Imam di Sambas, Borneo Barat. Rid}a juga mengatakan bahwa pertanyaan Basiuni tentang “Mengapa umat Islam tertinggal sedangkan umat non-Islam mengalami kemajuan” dilatarbelakangi oleh situasi Nusantara, khususnya di Tanah Melayu (Jawi) yang tertinggal di segala bidang termasuk pendidikan. Dalam tulisan ini, Rid}a tidak secara khusus menguraikan pemikiran dan praktik Maharaja Imam dalam bidang pendidikan.
2. Artikel yang ditulis oleh Isyatul Mardiyati dengan judul “*Perkembangan Pendidikan dan Perilaku Keberagamaan pada masa Kesultanan Sambas*”. Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 2, November 2011, 335-358. Mardiyati berkesimpulan bahwa kekuasaan kerajaan yang memiliki peran strategis dalam politik dan militer secara tidak langsung memengaruhi percepatan proses penyebaran dan asimilasi keilmuan. Namun hal ini tentu tidak hanya dapat dilakukan dengan tekanan yang malah menimbulkan konflik sosial, melainkan perlu ditekankan dengan kebijaksanaan, kewibawaan, dan intelektualitas yang tinggi. Meskipun dalam tulisannya ini Mardiyati menggambarkan tentang perkembangan pendidikan Islam, namun ia belum menyentuh bagaimana pemikiran dan praktik Basiuni dalam inovasi pendidikan Islam secara spesifik.
3. Artikel “*Dynamic of Local Islam; Fatwa of Muhammed Basiuni, The Grand Imam of Sambas, on The Friday Prayer Attended by Fewer than Fourty People*”, yang ditulis oleh Hamka Siregar. Tulisan ini dimuat dalam Al-Albab Borneo Journal of Religious Studies (BJRS), volume 2, nomor 2, Desember 2013, 187-201. Siregar menyimpulkan bahwa pemikiran hukum Islam itu dinamis. Dari topik ini, dapat diketahui kajian yang dilakukan penulisnya lebih berorientasi kepada hukum Islam dan bukan kajian pendidikan.

4. Karya Mahmud Junus (1976), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, merupakan karya tertua dan relatif komprehensif tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam bukunya, Junus berupaya untuk memotret sejarah pendidikan Islam di Nusantara secara umum. Namun, ia menulis tidak lebih dari dua halaman tentang perkembangan dan inovasi pendidikan Islam di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan data yang ia miliki lantaran hanya mengandalkan informasi yang dikirimkan oleh koleganya di Kalimantan. Namun harus diakui karyanya ini merupakan karya ensiklopedis pertama yang memiliki kontribusi akademik bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
5. Karya G.F. Pijper (1987), berjudul *Beberapa Studi tentang Islam di Indonesia*, relatif lengkap mengungkap riwayat hidup Basiuni mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, hingga karya-karyanya. Namun, kiprah Maharaja Imam Sambas dalam bidang pendidikan tidak menjadi fokus karyanya ini.
6. Karya Martin van Bruinessen (1992) tentang biografi singkat berjudul “Muhammad Basyuni b. Muhammad Imran Sambas West Borneo, 1885-1953” dimuat dalam *Dictionnaire Biographique*. Bruinessen menguraikan tentang riwayat hidup Maharaja Imam Sambas secara singkat terutama tentang latar belakang keluarga dan karya-karyanya. Ia tidak menyinggung lebih jauh tentang kontribusi Basiuni dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan penelusuran literatur dan hasil penelitian berkaitan dengan kontribusi Maharaja Imam Sambas dalam inovasi pendidikan Islam di Kerajaan Sambas (1915-1950), belum ditemukan kajian khusus yang memfokuskan pembahasannya pada inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Basiuni. Barangkali, karya Mahmud Junus merupakan satu-satunya tulisan yang memuat sejarah pendidikan di Kalimantan, di mana karya-karya yang lahir tentang sejarah pendidikan Islam berikutnya selalu merujuk kepada karya yang satu ini.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian berbentuk disertasi ini disajikan dalam lima bagian, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Bagian pendahuluan, di dalamnya diuraikan hal pokok mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua, kajian pustaka yang menjadi landasan teoretik penelitian ini. Bab ini meliputi teori tentang kontribusi dan teori komponen pendidikan Islam. Teori-teori ini menjadi *frame* (bingkai) temuan dan pembahasan penelitian tentang peran dari Maharaja Imam Sambas dalam melakukan *islah* (perbaikan) pendidikan Islam di Kerajaan Sambas.

Selanjutnya bagian ketiga, metodologi penelitian. Bab ini mencakup pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan diletakkan pada bab keempat. Pada bagian ini, sistematika disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu profil Maharaja Imam H. Muhammad Basiuni Imran, masing-masing terdiri atas penyajian data tentang silsilah keluarga, riwayat pendidikan, karya tulis, dan jabatan serta penghargaan yang pernah ia terima. Dalam konteks pendidikan Islam di Kerajaan Sambas, kontribusi Basiuni dalam pemikiran diuraikan pada sub berikutnya meliputi: Tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum dan metode. Sementara itu kontribusinya dalam praktik pendidikan Islam mencakup upaya-upaya yang ia lakukan dalam rangka memperbaiki praktik pendidikan antara lain: Madrasah berkelas (klasikal), Sekolah Islam, Penyusunan buku ajar (literatur), kaderisasi guru, dan wakaf pendidikan. Aspek-aspek dari temuan penelitian tersebut, dibahas pada sub-bagian berikutnya.

Bagian akhir penulisan laporan penelitian ini merupakan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan disertasi yang diharapkan dapat menarik intisari dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab terdahulu menjadi satu rumusan yang



bermakna. Selain itu, bagian akhir ini memuat saran-saran yang patut untuk diajukan sebagai harapan kedepan guna kebermanfaatan penelitian ini.

